

PENGANTAR

Perubahan yang mendasar dalam tatanan pemerintah dewasa ini menuntut organisasi pemerintah melakukan perbaikan – perbaikan dalam tata laksana pekerjaannya. Perbaikan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan konsisten dan berkelanjutan sehingga tercipta suatu integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam perencanaan pembangunan dengan berorientasi kepada pencapaian hasil.

Rencana Kerja (RENJA) organisasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Provinsi Sumatera Barat untuk periode 1 (satu) tahun yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP)Provinsi Sumatera Barat.

Tersusunnya rencana kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 ini tidak terlepas dari kerja sama semua pihak dilingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

Padang, 2019
Kepala DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat

MASWAR DEDI, A.P, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP, 19740618 199311 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dalam upaya mendukung prioritas nasional dan daerah, DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat menyusun Rencana Kerja Tahun 2019. Penyusunan Renja DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 ini didasarkan pada Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Kabinet Kerja telah menetapkan 9 agenda prioritas (Nawacita). Prioritas keenam dari Nawacita tersebut adalah **meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional**, yang memuat program-program investasi. Disamping itu juga Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 yang disusun oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Proses penyusunan Renja DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 ini didasarkan pada penjaringan aspirasi yang secara formal diformulasikan melalui Rapat Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal yang melibatkan instansi terkait kabupaten/kota dan provinsi. Oleh karena itu Renja DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 mengintegrasikan program-program pemerintah pusat dan program-program kabupaten/kota maupun program-program hasil penjaringan aspirasi.

Dokumen Renja OPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan OPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD. Renja OPD ini nantinya disusun menjadi rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dijadikan dasar penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 mengacu pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tatacara Musrenbang;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat; dan
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Revisi Tahun 2016-2021;

17. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/1157/II/RENMAKRO/Bappeda-2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019;
18. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/265/265/V/RENMAKRO/Bappeda-2018 Tanggal 18 Mei 2018 tentang Penyempurnaan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2019.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 adalah sebagai dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat untuk 1 (satu) tahun periode. Tujuan disusunnya Rencana Kerja DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat adalah: untuk menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Rencana Kerja DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, yang mencakup: latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Pada bagian ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan tahun lalu dan capaian renstra OPD, analisis kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM KEGIATAN

Pada bagian ini dijelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja OPD dan program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini menguraikan Rencana Kerja OPD yang berisikan Program dan Kegiatan, serta indikator kinerja dan pendanaan perangkat daerah.


BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2018 dan Capaian Renstra SKPD

inas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat telah menyusun program kerja dalam rangka menyelenggarakan pelaksanaan penanaman modal di daerah. DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017 telah melaksanakan 2 (dua) program utama yang terdapat dalam kelompok belanja langsung urusan dan 6 (enam) program yang sifatnya *supporting* terhadap program utama, terdapat pada kelompok belanja langsung pokok. Adapun program dan kegiatan yang telah disusun pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

I. BELANJA LANGSUNG POKOK

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
8. Penyediaan Makanan dan Minuman
9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
10. Penyediaan Jasa Pembinaan Mental & Fisik Aparatur

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Mebeuler
2. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputer
3. Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeuler
8. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD
9. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
10. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
2. Penatausahaan Keuangan SKPD
3. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD
5. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran/Tahunan

F. Program Perencanaan, Pengelolaa, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Aset

1. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
2. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD
3. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD

II. BELANJA LANGSUNG URUSAN

A. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1. Penyelesaian Permasalahan Investasi
2. Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal
3. Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
4. Gelar Potensi dan Temu Usaha
5. Pembuatan Bahan/Materi Promosi Investasi
6. Penyusunan Profil Peluang Investasi Sumatera Barat
7. Koordinasi Promosi dan Misi Investasi
8. Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat
9. Penyelenggaraan Promosi Investasi
10. Peningkatan Kerjasama Strategis antara Usaha Besar dengan UMKMK
11. Peningkatan Kerjasama Investasi dengan Lembaga Terkait dan Dunia Usaha
12. Inventarisasi Tanah Ulayat Yang Berpotensi untuk Penanaman Modal

B. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
2. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera

Didalam mewujudkan program kerjanya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2017 ini

mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 15.382.080.537,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 14.598.354.128,- (94.90%). Untuk Belanja Tidak Langsung, yaitu belanja yang dianggarkan untuk Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan Pegawai, serta Tambahan Penghasilan PNS) mendapat dukungan dana APBD sebesar Rp. 5.438.275.637,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.050.177.205 (92.86%). Sementara itu program kerja yang disusun dalam bentuk kegiatan, dimana program kerja yang kontribusinya terhadap pencapaian prestasi kerja dapat diukur, dialokasikan melalui Belanja Langsung (yang terdiri dari Belanja Langsung Pokok dan Belanja Langsung Urusan) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 9.943.804.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.548.176.924 (96,02%).

Dari program dan kegiatan yang telah disusun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dan telah dianggarkan dalam Belanja Langsung Urusan, secara keseluruhan dapat dikelompokkan menjadi 3 (dua) kategori yaitu:

- A. Kegiatan yang tidak mencapai target, yaitu:
 - 1. Penyelesaian Permasalahan Investasi
- B. Kegiatan yang mencapai target yaitu:
 - 1. Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - 2. Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - 3. Gelar Potensi dan Temu Usaha
 - 4. Pembuatan Bahan/Materi Promosi Investasi
 - 5. Penyusunan Profil Peluang Investasi Sumatera Barat
 - 6. Koordinasi Promosi dan Misi Investasi
 - 7. Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat
 - 8. Penyelenggaraan Promosi Investasi
 - 9. Peningkatan Kerjasama Strategis antara Usaha Besar dengan UMKMK
 - 10. Peningkatan Kerjasama Investasi dengan Lembaga Terkait dan Dunia Usaha
 - 11. Inventarisasi Tanah Ulayat yang Berpotensi untuk Penanaman Modal
- C. Kegiatan yang melebihi target yaitu:
 - 1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - 2. Inventarisasi Tanah Ulayat Yang Berpotensi untuk Penanaman Modal

Adapun uraian pelaksanaan program dan kegiatan pada Belanja Urusan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

A. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Adapun Kegiatan-kegiatan untuk mendukung terwujudnya pencapaian target program ini, sebagai berikut :

a. **Penyelesaian Permasalahan Investasi**, dukungan anggaran untuk kegiatan Penyelesaian Permasalahan Investasi ini adalah sebesar Rp. 93.900.000,-. Capaian realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp. 86.577.900,- (92.20%), dan capaian fisiknya sebesar 84%. Kinerja keluaran hasil dapat tercapai sesuai target. Rendahnya penyerapan anggaran di bawah 95% adalah sisa anggaran pada Belanja Bahan Bakar/Gas (yang digunakan untuk kegiatan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

- ❖ Maksud dari kegiatan Penyelesaian Permasalahan Investasi yaitu implementasi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di Sumatera Barat, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dengan berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dan Instansi Teknis terkait dalam Penanaman modal atau yang menangani fungsi Penanaman Modal di Kab/Kota merupakan lembaga yang mengkoordinir kegiatan investasi PMA/PMDN yang menjadi kewenangan masing-masing yang diharapkan dapat membantu para penanam modal agar dapat merealisasikan proyeknya dengan lancar dan aman tanpa ada hambatan yang berarti.
- ❖ Tujuan kegiatan adalah agar permasalahan investasi yang dapat mengganggu dan menghambat kelancaran investasi PMDN/PMA di Kabupaten/Kota khususnya di Sumatera Barat pada umumnya dapat di fasilitasi dan ditangani secara baik, cepat, tepat dan terkoordinir melalui suatu Tim koordinasi penanaman modal yang melibatkan instansi/lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- ❖ Keluaran atau output dari kegiatan ini:
 1. Jumlah Perusahaan PMA/PMDN di Sumatera Barat yang difasilitasi permasalahan dalam Penanaman Modal sebanyak 4 Perusahaan PMA/PMDN.
 2. Dari 4 perusahaan PMA/PMDN yang difasilitasi permasalahannya yang dapat terselesaikan tuntas permasalahannya yakni PT. Bintang Paradiso Resort, PT. Energi Baru Terbarukan, PT. Energi Taratak Tampatih dan CV. Putra Idola,

b. **Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal** dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 120.000.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 386.898.964,- (92,12%). Untuk fisik tercapai juga sebesar 100%.

- ❖ Kegiatan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal ini dimaksudkan untuk melakukan dan mengikuti pertemuan koordinasi kelembagaan investasi daerah dalam lingkup Provinsi dan nasional untuk bertukar informasi serta mencari solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi terkait dengan kegiatan investasi daerah.
- ❖ Kegiatan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi program/kegiatan penanaman modal pusat dan daerah serta mengidentifikasi berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi daerah dalam kegiatan investasi dilihat dari aspek perencanaan dan kebijakan, promosi, perizinan dan pengendalian penanaman modal.

Dari pelaksanaan kegiatan ini diperoleh rumusan rekomendasi terkait permasalahan/kendala dibidang perencanaan dan kebijakan, promosi, pengendalian dan pembinaan penanaman modal serta pelayanan perizinan tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Hasil kegiatan ini adalah terciptanya harmonisasi perencanaan dan kebijakan, promosi, perizinan, dan pengendalian penanaman modal di tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Nasional (sesuai target) sebanyak 3 rumusan terkait perencanaan dan kebijakan, promosi, perizinan, dan pengendalian penanaman modal.

- c. Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal** dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 370.000.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 355.341.000,- atau sebesar 96.04% dan realisasi fisik dapat tercapai 100% sesuai dengan target.

Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal dan penggunaan fasilitas penanaman modal serta melakukan kegiatan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) proyek perusahaan PMA/PMDN untuk penerbitan izin usaha dilakukan terhadap perusahaan yang sudah memproduksi komersil dan telah merealisasikan investasinya minimal 75% dari rencana dan untuk proses pencabutan Surat Persetujuan/pembatalan dilakukan bagi perusahaan yang tidak pernah merealisasikan investasinya sama sekali dan tidak lagi memproduksi atau macet serta tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Dengan demikian maksud dan tujuan dilaksanakan Pengawasan terhadap perusahaan PMA/PMDN adalah agar penyimpangan yang dilakukan para penanam modal dapat diminimalisir sesuai ketentuan yang berlaku dan BKPM & PPT Provinsi tidak lagi mencatat data perusahaan yang tidak produktif sehingga data yang ada akan lebih

baik serta diharapkan target realisasi investasi yang telah ditetapkan dapat dicapai.

❖ Keluaran dari kegiatan ini adalah:

1. Pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan PMA/PMDN sebanyak 12 perusahaan (tercapai sesuai target), yaitu:
 - 5 perusahaan sudah produksi
 - 6 perusahaan masih dalam masa konstruksi
 - 1 perusahaan tidak ada aktifitas dilapangan (tidak merealisasi investasinya) atau macet
2. Pembuatan BAP Penerbitan dan Pencabutan Izin Prinsip/SP terhadap 10 perusahaan (sesuai target 10 perusahaan), yaitu:
 - 3 Perusahaan untuk izin usaha tetap
 - 7 Perusahaan BAP pencabutan

❖ Hasil dari pelaksanaan kegiatan adalah:

- Adanya penyampaian LKPM oleh perusahaan PMA/PMDN dan pelaksanaan kegiatan investasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebanyak 12 perusahaan (dapat mencapai target 12 perusahaan).
- Adanya kemudahan bagi investor dalam pengurusan Izin Usaha Tetap (IUT) dan terlaksananya pencabutan Surat Persetujuan (SP) bagi perusahaan yang macet sebanyak 10 perusahaan dapat tercapai sesuai target.

d. **Gelar Potensi dan Temu Usaha** dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 88.000.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 77.054.435,- (92.25%), untuk realisasi fisik tercapai 100%, sesuai dengan target.

❖ Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk:

- Memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam rangka promosi sektor unggulan sebagai peluang investasi dalam suatu pertemuan dengan para calon investor.
- Menarik minat calon investor untuk melakukan kegiatan investasi di Sumatera Barat.

Penyelenggara dari kegiatan Gelar Potensi dan Temu Usaha adalah merupakan kegiatan pertemuan koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi bersama Kabupaten/Kota yang mempunyai potensi peluang investasi dengan para pengusaha perantau Minang, Asosiasi yang bergerak dalam bidang peningkatan ekonomi, calon investor baik nasional maupun internasional.

Kegiatan ini telah melakukan fasilitasi kepada calon investor yang pelaksanaan bersamaan dengan pelaksanaan Sumbar Expo di Batam, yang menghasilkan ketertarikan beberapa investor, seperti:

1. Andy Setiawan (Overseas Business MD) dari Surabaya tertarik untuk berinvestasi di sektor Perkembunan Nilam di Kabupaten Pasaman Barat.
 2. Ke Zong Xian berasal dari PT. Damai Indo Pertama Sukses dan PT. Sehat Bulan Investama yang tertarik berinvestasi di sektor, antara lain :
 - Karet di Kab. Sijunjung
 - Damar di Kab. Sijunjung
 3. Ir. Irsafwin berasal dari PT. Multi Energi Sarana Batam yang tertarik untuk berinvestasi di bidang:
 - Pengolahan Sampah di Kota Swahlunto
 - Air Minum Sehat di Kota Sawahlunto
 4. A.Jabbar Hanief berasal dari Singapura VBN International Enterprise yang tertarik untuk berinvestasi di bidang :
 - Minyak Nilam di Kab. Pasaman Barat
 - Pariwisata di Kab. Pdg. Pariaman
 5. Imam Mocktar dan Amanto berasal dari PT. Semen Bosowa di Kota Batam yang tertarik untuk berinvestasi di sektor Industri Semen di Sijunjung.
- ❖ Keluaran dari kegiatan ini dapat dicapai sesuai target yaitu 1 kali pertemuan GPTU yang dihadiri oleh 50 orang.
Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya jumlah calon investor yang berminat menanamkan modalnya di Sumatera Barat sebanyak 5 calon investor (sesuai target).
- e. Pembuatan Bahan/Materi Promosi Investasi** dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 295.577.450,- (98,53%), serta realisasi fisik tercapai 100%.
- ❖ Maksud dari kegiatan ini adalah agar bahan informasi tentang potensi dan peluang investasi Sumatera Barat tersedia lengkap dengan data terkini dan dapat digunakan untuk keperluan promosi.
 - ❖ Sementara itu tujuan kegiatan ini adalah menyediakan informasi tentang potensi dan peluang investasi daerah agar pengguna terutama calon investor tahu apa yang menjadi peluang untuk berinvestasi di Sumatera Barat dan menyediakan bahan penunjang pelaksanaan promosi investasi.
- Pada tahun 2017, DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat membuat atau melakukan pengadaan 5 bahan materi promosi yaitu Peta Investasi, Pembuatan Tas Promosi, Pembuatan Map Investasi, Pembuatan Souvenir Eksklusif, Pembelian Flashdisk. Adapun pelaksana dari masing-masing pembuatan/pengadaan materi promosi tersebut adalah PT. CELYFA dan PD. Perdana Abadi.

- ❖ Keluaran pada kegiatan ini dapat tercapai sesuai target, dengan rincian sebagai berikut:
 - Peta investasi sebanyak 500 buah
 - Tas promosi sebanyak 100 buah
 - Map investasi sebanyak 300 buah
 - Souvenir Eksklusif sebanyak 80 buah

Adapun hasil yang dicapai pada kegiatan ini adalah tersedianya bahan presentasi tentang peluang investasi yang ada di Sumatera Barat yang akan ditawarkan kepada calon investor serta materi promosi sebanyak 4 (empat) macam materi promosi investasi (sesuai target) serta bahan untuk display promosi investasi.

f. Penyusunan Profil Peluang Investasi Sumatera Barat dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.044.900.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 1.023.227.019,- (97,55%), serta realisasi fisik tercapai 100%.

- ❖ Maksud dari kegiatan ini adalah menyediakan data dan informasi peluang investasi prioritas Sumatera Barat terutama untuk kelayakan perencanaan kawasan ekonomi khusus Mandeh yang difokuskan pada pariwisata dan prospek usaha prioritas dibidang energi baru terbarukan (pembangkit listrik tenaga biogas dari limbah kelapa sawit di Kab. Dharmasraya.
- ❖ Sementara itu tujuan kegiatan ini adalah menyusun profil peluang investasi prioritas Sumatera Barat yang akan ditawarkan ke pada investor, identifikasi kondisiobjektif potensi investasi secara akurat dan layak ditawarkan kepada investor serta mengetahui kelayakan KEK Pariwisata Mandeh dan Investasi Pembangunan Proyek PLTG dari Limbah Cair Kelapa Sawit. Pada tahun 2017, DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat membuat atau melakukan pengadaan 5 bahan materi promosi yaitu Peta Investasi, Pembuatan Tas Promosi, Pembuatan Map Investasi, Pembuatan Souvenir Eksklusif, Pembelian Flashdisk. Adapun pelaksana dari masing-masing pembuatan/pengadaan materi promosi tersebut adalah PT. CELYFA dan PD. Perdana Abadi.
- ❖ Keluaran pada kegiatan ini dapat tercapai sesuai target, dengan rincian sebagai berikut:
 - Peta investasi sebanyak 500 buah
 - Tas promosi sebanyak 100 buah
 - Map investasi sebanyak 300 buah
 - Souvenir Eksklusif sebanyak 80 buah

Adapun hasil yang dicapai pada kegiatan ini adalah tersedianya bahan presentasi tentang peluang investasi yang ada di Sumatera Barat yang akan ditawarkan kepada calon investor serta materi promosi sebanyak 4 (empat) macam materi promosi investasi (sesuai target) serta bahan untuk display promosi investasi.

g. Koordinasi Promosi dan Misi Investasi dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan dapat direalisasikan keuangan sebesar Rp. 44.161.050,- (88.32%), serta realisasi fisik tercapai 100%. Sedangkan capaian kinerja sesuai target kinerja yang telah ditetapkan, yaitu dari 6 kabupaten/kota yang menjadi target untuk dilakukan koordinasi dan target calon investor yang difasilitasi tercapai sebanyak 6 calon investor.

❖ Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah:

- Mengkoordinasikan rencana promosi dan hasil promosi Sumatera Barat secara terintegrasi dengan pemerintah pusat, dinas instansi terkait dan kab/kota.
- Memfasilitasi para pengusaha/calon investor/dunia usaha yang berminat ke daerah tempat tujuan rencana investasi.
- Memfasilitasi misi investasi dari luar ke Sumatera Barat dalam bentuk koordinasi, pendampingan maupun pertemuan sesuai kebutuhan.

❖ Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- Terlaksananya koordinasi promosi dan misi investasi dengan kabupaten/kota sebanyak 6 kabupaten/kota sesuai target (target 6 kabupaten/kota).
- Jumlah calon investor yang difasilitasi sebanyak 6 calon Investor sesuai target (target 6 calon investor), yaitu:
 1. Investor dari Putera Sampoerna foundation yang melakukan kunjungan ke Jakarta dan mengadakan pertemuan dengan Bapak Gubernur dan SKPD terkait pada tanggal 7 Januari 2017.
 2. Investor asal Belarusia dari perusahaan Belzarubezhstroy yang melakukan audiensi dengan Bapak Gubernur Sumatera Barat mengenai rencana investasi sektor energi, yaitu pembangunan PLTM pada tanggal 9 Mei 2017.
 3. Kunjungan Mr. Frid Razalee, CEO Baracca Ltd dan Mr. Simon B Schmidt Managing Director Tacicus Consultans yang menemui Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat mengenai investasi Sumatera Barat yang berminat disektor pariwisata dan energi pada tanggal 16 Mei 2017.
 4. Kunjungan kedua calon investor dari perusahaan Belzarubezhstroy pada tanggal 17-19 Mei 2017 sebagai tindak lanjut dari kunjungan sebelumnya tanggal 9 Mei 2017.
 5. Kunjungan ketiga calon investor dari perusahaan Belzarubezhstroy pada tanggal 12 Juni 2017 yang melakukan kunjungan lapangan ke kepulauan

Mentawai dan audiensi dengan Bupati Kepulauan Mentawai.

6. Calon Investor asal Norwegia yang bermaksud kerjasama dalam pembangunan centre of excellence of carbon capture utilization an storage.

Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya koordinasi promosi & kerjasama dengan kabupaten/kota sebanyak 6 kabupaten/kota dan meningkatnya minat calon investor yang ingin berinvestasi di Sumatera Barat dengan cara menghubungi pihak DPM & PTSP menanyakan tentang peluang investasi yang mereka minati melalui media elektronik.

h. Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera

Barat dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 80.900.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 78.128.000,- (96,57%), dan realisasi fisik tercapai 100%.

- ❖ Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk pengumpulan dan analisis data terhadap data-data penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat dan dilanjutkan dengan Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal sehingga tersedia data dan informasi tentang penanaman modal provinsi Sumatera Barat yang up to date dan informatif bagi pengguna buku data perkembangan penanaman modal Sumatera Barat tahun 2017 sebagai dasar perencanaan, pengembangan, pengendalian dan penyusun kebijakan daerah mengenai penanaman modal.
- ❖ Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah buku Perkembangan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Tahun 2017 sebanyak 100 (seratus) buku, dapat dicapai sesuai target. Hasil dari kegiatan ini adalah dapat dimanfaatkannya data perkembangan realisasi investasi fasilitas dan non fasilitas di Sumatera Barat bagi pengambil kebijakan dan dunia usaha sebanyak 19 kab/kota.

i. Penyelenggaraan Promosi Investasi dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.725.077.834,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 1.613.708.489,- (93,54%), dan untuk fisik realisasinya juga 100%.

- ❖ Maksud dan tujuan diadakan Promosi Investasi adalah agar potensi dan peluang investasi Sumatera Barat dapat dikenal oleh kalangan dunia usaha (investor) sehingga menjadikan Sumatera Barat sebagai daerah tujuan investasi, menarik minat dari calon investor yang ingin berinvestasi di Sumatera Barat, serta membangun citra positif yang dapat menimbulkan

kepercayaan investor terhadap Sumatera Barat sebagai daerah tujuan investasi yang menguntungkan.

Uraian beberapa kegiatan terkait dengan promosi investasi selama tahun 2017, adalah sebagai berikut:

B. Dalam Negeri:

1. Kegiatan Regional Investment Forum 2017

Regional Investment Forum dilaksanakan di Bali dari tanggal 22 s/d 25 Februari 2017.

Promoting Investment in Tourism Industry and Supporting Infrastructure atau Promosi Investasi di Bidang Industri Pariwisata" adalah tema utama pada RIF 2017. RIF 2017 terdiri dari beberapa agenda seperti seminar, diskusi panel, *one on one meeting*, *debottlenecking meeting*, peninjauan lapangan dan dibuka secara resmi oleh Kepala BKPM RI.

Kegiatan ini dihadiri Pemerintah pusat dan daerah, kalangan swasta dan sejumlah calon investor dari beberapa negara serta DPM dan PTSP Provinsi dan Kab/Kota dari beberapa wilayah Indonesia. Pada sesi forum investasi, RIF 2017 menampilkan pemateri dari kalangan *top executive* baik dari pemerintahan maupun dunia usaha seperti antara lain Kepala BKPM RI, Menteri Pariwisata, Dubes RI untuk Cina, Dubes RI untuk UEA, CEO Sinarmas Land Group, President Direktur Bank BNI, and *President Director of Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC)*.

Kegiatan *Regional Investment Forum* dihadiri oleh DPM dan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota dari beberapa wilayah di Indonesia termasuk DPM dan PTSP Provinsi Sumatera Barat dan kabupaten/kota diantaranya Kabupaten Agam, Tanah Datar, Pasaman, Pesisir Selatan dan Kota Solok.

Pada akhir forum, dilanjutkan dengan *one on one meeting*, BKPM Pusat memfasilitasi pertemuan DPM dan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk bertemu langsung dengan para calon investor yang berminat dari beberapa negara, diantaranya Singapura, Cina, Taiwan, Jepang dan sebagainya.

Kegiatan ini dihadiri Pemerintah pusat dan daerah, kalangan swasta dan sejumlah calon investor dari beberapa Negara serta DPM dan PTSP Provinsi dan Kab/Kota dari beberapa wilayah Indonesia. Pada sesi forum investasi, RIF 2017 menampilkan pemateri dari kalangan *top executive* baik dari pemerintahan maupun dunia usaha seperti antara lain Kepala BKPM RI, Menteri Pariwisata, Dubes RI untuk Cina, Dubes RI untuk UEA, CEO

Sinarmas Land Group, President Direktur Bank BNI, and President Director of Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

Kegiatan *Regional Investment Forum* dihadiri oleh DPM dan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota dari beberapa wilayah di Indonesia termasuk DPM dan PTSP Provinsi Sumatera Barat dan kabupaten/kota diantaranya Kabupaten Agam, Tanah Datar, Pasaman, Pesisir Selatan, dan Kota Solok.

Pada akhir forum, dilanjutkan dengan *one on one meeting*, BKPM Pusat memfasilitasi pertemuan DPM dan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk bertemu langsung dengan para calon investor yang berminat dari beberapa negara, diantaranya Singapura, Cina, Taiwan, Jepang dan sebagainya.

Hasil dari kegiatan ini adalah :

Pada sesi *one on one meeting* dilaksanakan, ada beberapa calon investor yang menunjukkan ketertarikan antara lain :

1. Mr. Masashige Urata yang berasal dari Hokkaido, Jepang, daerah yang juga merupakan tujuan wisata yang populer di Jepang tertarik untuk berinvestasi di Sumatera Barat. Yang bersangkutan secara spesifik mencari daerah yang sejuk. Wilayah yang ditawarkan adalah Kabupaten Solok, khususnya Danau Diatas dan Danau di Bawah yang beriklim sejuk serta telah mempunyai infrastruktur yang memadai.
2. Mr. Jonghyuk merupakan perwakilan dari Perusahaan Sangyong yang merupakan salah satu Perusahaan Automotif terbesar di Korea Selatan yang juga telah merintis usaha di bidang pariwisata khususnya Industri Perhotelan. Provinsi Sumbar menawarkan Kota-Kota atau daerah di Sumatera Barat yang belum memiliki hotel bintang 4.
3. Serupa dengan Sangyong, LG yang di Indonesia telah dikenal sebagai Produsen barang-barang Elektronik juga telah mulai berinvestasi di Industri Pariwisata. Saat ini mereka tengah mencari daerah-daerah yang potensial untuk dibangun hotel atau infrastruktur pendukung lainnya.
4. Mr. Misyal Bahwal adalah pengusaha Indonesia keturunan India yang mempunyai akses ke banyak investor besar di India yang tertarik untuk berinvestasi di bidang pariwisata. Sumatera Barat adalah satu daerah yang diminati. Mr. Misyal akan menghubungi kembali DPM PTSP Sumbar.

5. PT. AGS adalah salah satu perusahaan konglomerat di Turki yang bisnis utamanya di bidang energi dan tekstil yang juga tertarik untuk berekspansi di bidang pariwisata. Mereka tertarik untuk membangun *Cable Car* di Agam dan Infrastruktur penunjang lainnya,
6. Mrs. Amanda Zsebik mewakili perusahaan AL IKAI yang bergerak di bidang pelayaran khususnya kapal pesiar. Ybs telah lama mendengar tentang potensi Kab. Mentawai dan berminat untuk berinvestasi disana.

2. Kegiatan Batam Tourism Expo 2017

Batam Tourism Expo 2017 dilaksanakan di Batam dari tanggal 11 s/d 14 Mei 2017.

Batam Tourism Expo dan Forum 2017 merupakan Pameran dan Forum Bisnis Industri Pariwisata yang bertujuan untuk mempromosikan dan memasarkan destinasi objek wisata unggulan di Indonesia dan meningkatkan kunjungan turis dan menarik investor di sektor industri pariwisata. Kegiatan ini digelar oleh PT. Batam Promo Indonesia dan dukungan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Batam yang akan diadakan pada tanggal 11 s/ 14 Mei 2017 di Expo Hall, Mega Mall Batam dan Harris Hotel Batam Centre.

Pada sesi *one on one meeting* dilaksanakan, ada beberapa calon investor yang menunjukkan ketertarikan antara lain :

1. Dato Andrew Koh, Presiden Malaysia-China Economy Development Foundation yang tertarik pada potensi pembangunan hotel di Ulakan Tapakis
2. Ivan Theo, Honorary Chairman, GM-Ponderosa, Malaysia Association of Hotel Johor Chapter yang tertarik pada sektor pariwisata.

3. Kegiatan Internasional Powermax 2017

Pameran Internasional Powermax 2017 dilaksanakan di Jakarta dari tanggal 25 s/d 28 Juli 2017.

Pelaksanaan Pameran POWERMAX 2017, surat PT. MyExpo Kreasi Indonesia Nomor 6595/MKI/PD/VII/2017 tanggal 29 Mei 2017 perihal Surat Penawaran Stand dan Undangan dalam Kegiatan Power Plant & Manufacturing, Automation Expo 2017 (POWERMAX 2017), serta surat Direktur Fasilitas Promosi Daerah Nomor 77/B.3/A.6/2017 tanggal 7 Juli 2017 perihal Partisipasi Kegiatan POWERMAX 2017.

Pada kegiatan pameran yang dilaksanakan, calon investor yang menunjukkan ketertarikan antara lain :

- ✓ Ryad Chairil, PT. Solusi Limbah Energi yang tertarik pada potensi energi Kabupaten Pasaman

- ✓ Jhonson Jaya, PT. Jaya Samudra Karunia Gas tertarik sektor energy Kabupaten Pasaman.

4. Kegiatan Trade Expo Indonesia ke -32 Tahun 2017

Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan:

Trade Expo Indonesia ke-32 Tahun 2017 dilaksanakan di Banten dari tanggal 11 s/d 15 Oktober 2017.

Kegiatan Trade Expo Indonesia (TEI) 2017 adalah pameran dagang skala internasional terbesar di Indonesia diadakan oleh Kementerian Perdagangan berlangsung selama 5 hari dari tanggal 11 s.d. 15 Oktober 2017 bertempat di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Provinsi Banten. Kegiatan ini bertajuk "*Global Partner for Sustainable Resources*" berkaitan dengan kesiapan Indonesia untuk menjadi mitra penyedia sumber daya yang berkesinambungan bagi pelaku usaha dunia. Fokus utama TEI adalah transaksi *business-to-business* yang bersifat jangka panjang dan bertaraf internasional dengan tujuan untuk meningkatkan ekspor Indonesia di kancah perdagangan internasional.

Hasil dari kegiatan ini adalah adanya calon investor yang menunjukkan ketertarikan pada sektor renewable enegy, yakni SUMITO, PT Prima Tata Daya.

5. Kegiatan Sumatera Barat Expo 2017

Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan:

Sumatera Barat Expo 2017 dilaksanakan di Batam dari tanggal 9 s/d 12 November 2017.

Kegiatan Sumatera Barat Expo (Sumbar Expo) merupakan agenda rutin tahunan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat dalam memperkenalkan daerah Sumbar kepada pihak luar sekaligus menjembatani para pengusaha, akademisi, perantau dari Tanah Minang, hingga calon investor. Pada tahun 2017 ini kegiatan Sumbar Expo diselenggarakan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 9 s.d. 12 November 2017 bertempat di Lapangan Engku Putri Kota Batam. Adapun pemilihan Kota Batam sebagai tuan rumah Sumbar Expo karena memiliki lokasi strategis berdekatan dengan Negara Singapura dan Malaysia. Selain itu di kota ini terdapat banyak perantau asal Minang dan memiliki hubungan sosial budaya yang merupakan saudara serumpun Melayu.

Kegiatan Sumbar Expo 2017 diikuti oleh 19 Kabupaten/Kota, 17 organisasi perangkat daerah, 1 kabupaten luar Sumbar yaitu Ngawi dari Jawa Timur, 9

BUMN, dan 65 pengusaha. Selain mempertemukan berbagai kalangan, Sumbar Expo 2017 juga diisi dengan pengukuhan Ikatan Keluarga Sumatra Barat (IKSB) periode 2017-2022. Masyarakat Minangkabau atau warga Sumbar di tanah Batam, Kepulauan Riau menjadi salah satu komunitas yang cukup dominan. 27 persen dari 1,2 juta keseluruhan jumlah penduduk di Kota Batam merupakan keturunan Minang. Perantau Minang memiliki kontribusi yang cukup besar dalam pembangunan daerah Kepri, termasuk birokrat, politikus, tokoh agama, dan pengusaha. Dengan adanya kegiatan Sumbar Expo ini dapat menjadi ajang promosi semua potensi, sekaligus mengajak investasi dan wisatawan datang ke Sumbar.

Hasil:

Pada kegiatan pameran yang dilaksanakan, calon investor yang menunjukkan ketertarikan antara lain :

- ✓ Hendrik Tan Sandy yang tertarik pada sektor perkebunan Karet dan Damar.

6. Kegiatan Lombok Produk Unggulan, Perdagangan, Pariwisata dan Investasi (PPI) 2017

Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan:

Lombok PPI 2017 dilaksanakan di Lombok dari tanggal 30 November s/d 3 Desember 2017.

Kegiatan Lombok PPI 2017 yang rencananya akan diikuti oleh DPM dan PTSP mulai dari tanggal 30 Desember 2017, mengingat kondisi bencana alam (kondisi Gunung Agung pada status siaga I), sehingga tim pelaksana yang akan melanjutkan perjalanan ke Lombok harus ditunda sementara menunggu informasi selanjutnya dari maskapai penerbangan. Tanggal 1 Desember 2017, rombongan bertolak ke Lombok untuk melakukan persiapan di stand.

Hasil:

Pada kegiatan pameran yang dilaksanakan, calon investor yang menunjukkan ketertarikan antara lain :

- ✓ Arman RD tertarik pada sektor industry hilir khususnya kelapa sawit.

C. Kegiatan Luar Negeri:

Kegiatan Misi Investasi Sumatera Barat ke Norwegia

a. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan:

Oslo, Norwegia dilaksanakan dari tanggal 11 s/d 18 Januari 2017.

Hasil:

Pada sesi *one on one meeting* dilaksanakan, ada beberapa calon investor yang menunjukkan ketertarikan antara lain :

- ✓ Kelanjutan kerjasama dengan Pemerintahan Norwegia, Kementerian Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia tentang implementasi dari rencana yang sudah dibuat pada saat *readiness*. Dari 2 juta Ha lebih, hutan di Sumbang, 500 ribu Ha sudah dialokasikan untuk dikelola oleh masyarakat.
- ✓ SN Power (BUMN) Norwegia tertarik dan akan menindaklanjutinya untuk rencana investasi di sektor Hydropower di Sumatera Barat *Hidro Power*. Prospek yang ditawarkan untuk dibangun adalah 160MW (Mega Watt) di Kabupaten Pasaman di Sumatera Barat.
- ✓ Pharmaq, Zoetis Group, yang merupakan perusahaan vaksin ikan terbesar di Norwegia yang berkantor di Oslo. Pada pertemuan ini juga dibahas tentang vaksin terhadap virus dan bakteri pada ikan. Permasalahan kematian ikan emas sebelum berkembang Di Sumatera Barat ditengarai karena ada virus. Begitu juga beberapa ikan Nila terjangkit virus yang perlu dicari vaksinnya. Diharapkan didapatkan solusi yang optimal untuk mengatasi kematian ikan dan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kejadian ini. Pihak Pharmaq merespon tawaran dari Sumatera Barat ini dengan sangat positif dan menginginkan untuk ditingkatkan menjadi sebuah kerjasama yang konkrit.
- ✓ Kepada Mr. Oscar Fr. Graff, Manager & CTO Dept of Clean Carbon Aker Solutions, kami menyampaikan peluang bagi Pihak Aker Solution untuk mengubah limbah industri dan karbon menjadi bernilai ekonomi bagi Sumatera Barat. Pihak Aker Solution merespon dengan membantu terobosan teknologi dan investasi di Sumatera Barat. Kesepakatan yang dibicarakan antara lain mengenai *Carbon Capture & Utilization Plant*, Studi kelayakan teknologi dan ekonominya, kandungan lokal dan pemberdayaan SDM lokal, serta transfer ilmu dari Aker Solution kepada sumber daya manusia lokal.

2. Kegiatan Misi Investasi Sumatera Barat ke London

Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan:

London dilaksanakan dari tanggal 25 s/d 29 Maret 2017.

Hasil:

Mr. Frid Razalee CEO dari Barraca Ltd menyampaikan ketertarikannya kepada Wakil Gubernur Sumatera Barat

atas potensi yang dimiliki oleh Sumatera Barat, khususnya di bidang pembangkit listrik tenaga micro hidro dan pariwisata dan mengundang Wakil Gubernur untuk mengadakan pertemuan dengan relasi yang bersangkutan, yaitu Mr. Waheed Qaiser Managing Director Capital Synergies Ltd dan Mr. Philip Vasey Head of Research Maxim Corporate Finance Ltd, para profesional di bidang investasi dan fund manager yang mempunyai akses ke banyak investor potensial.

3. Kegiatan Misi Investasi Sumatera Barat ke Belanda, Belgia dan Polandia

Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan:

Den Haag, Brussel, Polandia dilaksanakan dari tanggal 23 s/d 31 Mei 2017.

Hasil :

- Tomo Group berminat untuk investasi dan menawarkan berbagai peluang serta strategi pengembangan *renewable energy* seperti di bidang PLTM/PLTMH, PLTA, juga pengolahan limbah di Sumbar.
- Sementara Ryszard Ciurus dari URSUS tertarik untuk kerjasama di bidang modernisasi Alsintan di Sumbar. Hal ini dimungkinkan, karena 60 persen penduduk Sumbar bergerak dibidang pertanian.
- Perusahaan Molenbergnatie yang merupakan perusahaan terbesar dan tertua di Belgia yang khusus bergerak di bidang perdagangan, penyimpanan dan logistik kopi. Perusahaan ini sudah mempunyai terminal untuk ekspor di Indonesia yaitu di Lampung dan Kalimantan Timur. Molenbergnatie melalui Country Managernya Charles Contamine menjelaskan, bahwa perusahaan yg telah berdiri sejak tahun 1867 (150 tahun lalu) itu, membeli kopi dari pedagang seluruh dunia. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat beserta Pemerintah Kabupaten Agam, Sijunjung dan Solok Selatan sangat tertarik untuk mengembangkan lebih lagi perkebunan dan produksi kopi di Sumbar yang kemudian bisa dijual ke Molenbergnatie. Pemerintah Daerah melalui stakeholder terkait, akan mendorong dan memfasilitasi petani kopi di Sumbar, agar bisa masuk dan bekerjasama dengan Molenbergnatie yang juga pemasok kopi Nestle, Starbuck dan lain-lain. Peluang petani kopi Sumbar terbuka lebar, karena kopi Indonesia, terutama kopi dari Sumatera Barat, merupakan kopi terbaik di dunia atau berada dalam kualitas tinggi. Kualitas kopi Sumatera, telah diakui

sendiri oleh Molenbergnatie, yang saat ini masih membutuhkan kopi dari Indonesia.

- SIPEF, perusahaan yang bergerak dibidang Perkebunan Palm Oil, Pisang, Karet, Nanas dan lain-lain. Menurut Chief Financial Officer SIPEF Mr. Johan Nelis, Perusahaan ini memiliki lebih dari 15 ribu pekerja dan 13 ribu orang berada di Sumatera, kecuali Sumatera Barat SIPEF belum ada investasinya dan telah berdiri sejak tahun 1919. SIPEF akan mensurvey untuk berinvestasi di Sumbar dengan cara kerjasama dengan masyarakat yang punya lahan. Selain itu, SIPEF bisa menyerap produksi sawit, karet, dan pisang dari petani perkebunan rakyat dengan harga yang baik.

4. Kegiatan Misi Investasi Sumatera Barat ke Ottawa, Kanada

Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan:

Ottawa dilaksanakan dari tanggal 23 s/d 29 Agustus 2017. Berdasarkan hasil dari komunikasi dengan KBRI Ottawa, untuk Kegiatan Misi Investasi Sumatera Barat dalam sesi *business forum*, *one on one meeting* dan kerjasama ekonomi regional dan internasional, Sumatera Barat akan mempromosikan beberapa potensi dan peluang investasi untuk sektor *tourism*, *renewable* (Hidro Power dan Geothermal) dan *fishery* yang masih terbuka untuk ruang investasi dan kerjasama. Selain berpartisipasi pada *Indovest 2017*, Pemerintah Sumatera Barat akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menawarkan potensi dan peluang investasi unggulan daerah dalam rangka menarik investasi dari Kanada ke Sumatera Barat dan menjajaki kemungkinan peluang kerjasama antar negara.

Hasil :

Bill Young, International Genetik yang tertarik terhadap peternakan sapi unggul yang berada di Padang Mangateh, Kabupaten Lima Puluh Kota. Pemerintah membutuhkan dukungan dari investor untuk pembenahan infrastruktur dan peningkatan penghasilan. Tindakan lanjut dari pertemuan ini, pihak investor berencana akan menjajaki kemungkinan investasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat.

5. Kegiatan Misi Investasi Sumatera Barat ke Cologne, Jerman

Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan:

Cologne, Jerman dilaksanakan dari tanggal 5 s/d 12 Oktober 2017.

Selain mengikuti kegiatan pameran Anuga 2017, Pemerintah Provinsi Sumbar juga bermaksud melakukan

kegiatan misi investasi dalam rangka promosi daerah di bidang investasi kepada para pelaku usaha dan investor potensial Jerman. Dalam hal ini Sumatera Barat akan mempromosikan beberapa potensi dan peluang investasi untuk sektor renewable energy, micro hydro powerplant, tourism, fishery, mining, industry dan sites for center industry yang masih terbuka untuk ruang investasi dan kerjasama.

Hasil :

- ✓ MAN Diesel dan Turbo di Oberhausen, Jerman tertarik bekerjasama di bidang investasi di sektor energi terbarukan.
- ✓ Di Kantor Bavarian Ministry of Economic Affairs and Media, ada tiga sesi pertemuan rombongan Gubernur, selain menyangkut geothermal, juga menawarkan investasi di bidang pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) dan kepariwisataan. Hans-Jurgen Radmacher didampingi Andreas Wurth, dari pihak negara Bagian Bavaria menyanggupi untuk membuka peluang buat usahawan setempat berinvestasi di Sumatera Barat dan koordinasi dengan Kedubes RI akan terus dilakukannya.

6. Kegiatan Misi Investasi Sumatera Barat ke Hawaii

Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan:

Manao, Hawaii, Los Angeles dilaksanakan dari tanggal 18 s/d 18 November 2017.

Merujuk surat dari Direktur Pusat Studi Negara-Negara Asia Tenggara dari *University of Hawaii* tanggal 10 Juli 2017 perihal undangan kepada Gubernur Sumatera Barat untuk dapat hadir dalam kuliah umum sekaligus menampilkan budaya dan kesenian tradisional pada acara *International Education Weeks* yang juga akan dihadiri oleh berbagai negara pada tanggal 13 s/d 17 November 2017. Dalam hal ini, Sumatera Barat berkesempatan untuk dapat mempromosikan budaya dan kesenian tradisional, promosi wisata, untuk itu DPM dan PTSP melakukan persiapan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait pelaksanaan kegiatan dan teknis perjalanan dinas keluar negeri.

- Melakukan koordinasi dengan KBRI dan Kemenlu terkait dan BKPM RI (IIPC) mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bermaksud untuk melaksanakan kegiatan promosi daerah pada Kegiatan *International Education Week* di Manoa, Universitas Hawaii pada tanggal 13–17 November 2017.

Selain mengikuti Kegiatan *International Education Week*, Pemerintah Provinsi Sumbar juga bermaksud melakukan kegiatan misi investasi dalam rangka promosi daerah di bidang investasi kepada para pelaku usaha dan investor potensial Hawaii dan Los Angeles dalam upaya mewujudkan peningkatan realisasi investasi nasional khususnya Sumatera Barat. Dalam hal ini, Sumatera barat akan mempromosikan beberapa potensi dan peluang investasi untuk sektor *renewable energy*, *micro hydro powerplant*, *tourism*, dan *agriculture* yang masih terbuka untuk ruang investasi dan kerjasama. Kegiatan ini difasilitasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di New York yang dilaksanakan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles.

Hasil :

- ✓ Investor Seafood, H & N Group, yaitu Mr. Hua Ngo, di Los Angeles California. Dalam kesempatan ini diijazahi untuk pengembangan tambak ikan patin di pantai Sumatera Barat. Dari pihak investor akan segera follow up, dengan mendatangkan tim surveillance ke Sumbar sebagai tindak lanjutnya. Tambak akan melibatkan masyarakat pesisir pantai, sehingga diharapkan akan mendongkrak kesejahteraan masyarakat nelayan.
- ✓ Investor Red Chamber Co, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perikanan. Penjajakan ini untuk investasi budi daya ikan nila di Sumatera Barat, dan mereka bertindak sebagai buyer ekspor produk perikanan Sumatera Barat.
- ✓ Dengan University of Hawaii, di bidang pendidikan dan kebudayaan, akan dilakukan sharing pembiayaan antara pemda dan University of Hawaii untuk ASN yang berminat melanjutkan sekolah S2 dan S3. Peningkatan capacity building bagi guru-guru melalui program dan kegiatan pelatihan dan TOT baik dilakukan di Hawaii maupun di Sumatera Barat. Hal ini menjadi penting dilakukan agar guru dan PNS Sumatera Barat nantinya akan memiliki kemampuan dan kualitas yang tinggi. Pertukaran mahasiswa antara

University of Hawaii, Unand dan UNP serta perguruan tinggi lainnya di Sumatera Barat. Ini diproyeksikan dengan biaya lokal, bukan internasional sehingga tidak memberatkan.

7. Kegiatan Misi Investasi Sumatera Barat ke Australia

Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan:

Adelaide, Sydney dan Melbourne dilaksanakan dari tanggal 26 s/d 30 November 2017.

Selain mengikuti Kegiatan *Indonesia Australia Business Summit*, Pemerintah Provinsi Sumbar juga bermaksud melakukan kegiatan misi investasi dalam rangka promosi daerah di bidang investasi kepada para pelaku usaha dan investor potensial Australia dalam upaya mewujudkan peningkatan realisasi investasi nasional khususnya Sumatera Barat. Dalam hal ini, Sumatera barat akan mempromosikan beberapa potensi dan peluang investasi untuk sektor *renewable energy, micro hydro powerplant, tourism*, dan *agriculture* yang masih terbuka untuk ruang investasi dan kerjasama. Kegiatan ini difasilitasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra yang dilaksanakan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sydney.

Hasil:

House of Indonesia PTY. Ltd, dengan brand trading Eastern Cross Trading (ETC). House of Indonesia merupakan inisiasi penuh dari Ibu Sulyanti yang didukung penuh Kementerian Perdagangan melalui Indonesian Trade Promotions Centre (ITPC) Sydney. Beliau mendukung program ini dan sepakat untuk mempromosikan Sumatera Barat yang akan dimulai dengan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

j. Peningkatan Kerjasama Strategis antara Usaha Besar dan UMKMK

dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 48.734.075,- (97,47%), dan realisasi fisik tercapai 100%.

- ❖ Maksud kegiatan Peningkatan Kerjasama Strategis antara Usaha Besar dan UMKMK adalah memfasilitasi terbentuknya kemitraan usaha besar dengan UMKMK dalam bentuk kerjasama yang saling memerlukan, dan menguntungkan sehingga akan meningkatkan daya saing dan UMKMK dalam memperkuat perekonomian masyarakat Sumatera Barat khususnya dan perekonomian Nasional umumnya.
- ❖ Dan tujuan dari kegiatan ini Kegiatan ini dilaksanakan agar usaha mikro dan kecil dapat berkembang menjadi usaha

menengah hingga menjadi besar seiring dengan hal tersebut dapat meningkatkan nilai investasi di Sumatera Barat.

- ❖ Kegiatan ini diikuti oleh 40 orang pelaku UMKMK di Kab. Narasumber dari kegiatan ini adalah Tim dari CV.Bunda/Reffan House. Dari pelaksanaan kegiatan ini terjadinya kesepakatan/MoU antara CV.Bunda/Reffan House selaku Usaha Besar dengan 34 pelaku UMKMK Kota Padang Panjang dan terjadinya kesepakatan/MoU antara CV.Bunda/Reffan House selaku Usaha Besar dengan 36 pelaku UMKMK Kota Solok.
- ❖ Keluaran yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya pertemuan fasilitasi kerjasama kemitraan antara UMKMK dengan pengusaha besar untuk 40 orang di Kab. 50 Kota 1 kali pertemuan (sesuai target).
Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya kesepakatan kemitraan antara usaha besar dengan UMKMK sebanyak 3 kesepakatan.

k. Peningkatan Kerjasama Investasi dengan Lembaga Terkait dan Dunia Usaha dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 47.422.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 46.399.750,- (97,84%). Untuk realisasi fisik tercapai melebihi target yang ditetapkan, yakni sebanyak 5 Lol atau sebesar 250%, (target 2 Lol).

- ❖ Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah:
 1. Mengkoordinasikan dan menindaklanjuti hasil promosi investasi Sumatera Barat.
 2. Memfasilitasi dunia usaha/calon investor yang berminat terhadap potensi investasi Sumatera Barat ke daerah tempat tujuan rencana investasi.
Memfasilitasi peningkatan kerjasama investasi dari luar ke Sumatera Barat dalam bentuk pendampingan maupun pertemuan sesuai kebutuhan.
 3. Melaksanakan penandatanganan 5 (lima) MoU/Lol
- ❖ Dari pelaksanaan kegiatan ini diperoleh keluaran telah terfasilitasinya kerjasama investasi pada 2 sektor, yaitu sektor panas bumi dan sektor pariwisata (sesuai target), dan telah difasilitasi, antara lain:
 1. Mr. William (BBM Minning Capital) dan Mr. Hoanes (BBM Mega Energy) yang melakukan audiensi dengan Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 3 Januari 2017 terkait rencana investasi di Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman pada bidang Pengolahan Sampah untuk menghasilkan energy.
 2. Investor asal Kuwait yang telah melaksanakan kunjungan lapangan ke pulau Marak Kab. Pesisir Selatan dan

menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan penandatanganan MoU dengan Pemerintah Indonesia pada pertengahan atau akhir tahun 2018. Kunjungan lapangan ini kemudian ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi dengan pemerintah Pesisir Selatan dengan Stakeholders terkait untuk memastikan bahwa lahan sudah free, clean and clear.

3. PT. Semen Bosowa Maros yang menyatakan keseriusannya untuk berinvestasi di bidang industri semen di Sijunjung dan bermaksud melakukan peninjauan lapangan pada bulan Januari 2018.

I. Inventarisasi Tanah Ulayat yang berpotensi untuk Penanaman Modal

dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 199.373.800,- (99,69%). Untuk realisasi fisik tercapai melebihi target yang ditetapkan, yakni sebanyak 6 persil dari 5 persil yang ditargetkan atau sebesar 120%.

- ❖ Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah:

Melakukan pengumpulan dan analisis terhadap tanah-tanah ulayat di Provinsi Sumatera Barat yang berpotensi untuk ditawarkan kepada investor sehingga dapat memberikan keuntungan dan manfaat bagi investor selaku pemakai tanah ulayat maupun pemilik tanah ulayat dengan sendirinya.

Tujuan dari Inventarisasi Tanah Ulayat yang Berpotensi untuk Penanaman Modal ini adalah untuk menyediakan pedoman bagi investor tentang kejelasan lokasi dan status tanah sebagai tempat untuk berinvestasi

- ❖ Hasil dari kegiatan ini diperoleh 6 persil dari 5 persil tanah ulayat yang berpotensi untuk penanaman modal, dimana lokasi ke 6 persil tersebut, adalah:

1. Persil di Jorong Ateh Laban, Nagari Halaban, Kab. 50 Kota untuk **kegiatan Pertambangan.**
2. Persil Guguak Sarai Tinggi di Jorong Guguak Anau, Nagari Guguak Sarai, Kab. Solok **untuk kegiatan Perkebunan.**
3. Persil di Keluarahan Silaing Bawah, Nagari Bukit Surungan, Kota Padang Panjang **untuk Kegiatan Pariwisata.**
4. Persil Talago Aie Tagonang, di Jorong Tabek Patah, Nagari Tabek Patah, Kab. Tanah Datar **untuk kegiatan Pariwisata.**
5. Persil Talago Aie Pakih, di Jorong Tabek Patah dan Jorong Data, Nagari Tabek Patah, Kab. Tanah Datar **untuk kegiatan Pariwisata.**
6. Persil Panorama Batu Badindiang, di Jorong Koto Alam, Nagari Tabek Patah, Kab. Tanah Datar **untuk kegiatan Pariwisata.**

B. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan program ini adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)** dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.137.772.500,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 1.128.277.628,- (99.17%) sedangkan untuk realisasi fisik atas penerbitan izin dan non izin yang ditargetkan melampaui realisasinya 2.119 izin/non izin dari 1.100 izin/non izin yang ditargetkan atau sebesar 193%, dan untuk penyelesaian izin/non izin sesuai dengan SOP adalah sebesar 80,04% dari target sebesar 80% atau sebesar 100,05% serta indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan tidak sesuai dengan target kinerja sebesar 3,3 realisasinya hanya sebesar 3,23 atau sebesar 97,88%.

- ❖ Maksud dari kegiatan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu adalah sebagai pendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat.
- ❖ Tujuan dari kegiatan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah untuk membantu masyarakat/pelaku usaha/investor/penanaman modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan serta informasi mengenai penanaman modal.

Ruang lingkup kegiatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Gubernur atau lembaga/instansi yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen perizinan bagi perusahaan/perorangan yang berlokasi di Sumatera Barat, dengan uraian kegiatan sebagai berikut:

1. Melayani permohonan perizinan berusaha sesuai kewenangan;
2. Melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan dari si pemohon;
3. Melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan yang diajukan pemohon;
4. Melakukan peninjauan lapangan, koordinasi dan rapat dengan instansi terkait bila diperlukan;
5. Melaksanakan proses permohonan perizinan penanaman modal melalui SPIPISE;

6. Melaksanakan proses permohonan perizinan Sektor Perdagangan berupa Angka Pengenal Impor (API) umum maupun produsen yang berbasis Website (internet); dan
 7. Menerbitkan dokumen perizinan berusaha.
- ❖ Keluaran Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) keluaran yaitu:
 1. Dalam rangka penyelenggaraan PTSP tahun 2017 telah diterbitkan izin dan non izin sebanyak 2.119 izin/rekomendasi melampaui target sebesar 193% (target: 1.100 izin/rekomendasi).
 2. Telah dilaksanakan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan dengan hasil sebesar 3,23 atau sebesar 97,88% (target 3,3).

Hasil dari kegiatan yaitu persentase perizinan penanaman modal yang diterbitkan tepat waktu dapat terealisasi sebesar 80.04% atau sebesar 100,05% (target 80%).

b. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.890.000.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 1.813.758.741,- (95,97%), dan fisik dapat terealisasi sebesar 100%.

- ❖ Maksud dan tujuan kegiatan adalah meningkatkan kemampuan teknis, pengetahuan dan wawasan aparatur penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan lebih baik serta menyebarluaskan informasi mengenai layanan perizinan dan non perizinan sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
- ❖ Keluaran dari kegiatan ini adalah Studi teknis terkait peningkatan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk 60 (enam puluh) orang aparatur DPM & PTSP kab/kota se Sumatera Barat dan 810 (delapan ratus sepuluh) orang aparatur camat, wali nagari, tokoh masyarakat dan pelaku usaha dari 9 (sembilan) kab/kota se Sumatera Barat sebanyak 6 (enam) angkatan.

Hasil dari kegiatan ini adalah adanya pemahaman aparatur terkait penyelenggaraan PTSP dan tata cara penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan.

Capaian Renstra SKPD

Selama tahun 2017, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dengan rujukan hasil penilaian kinerja dapat diilustrasikan pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1.
Capaian Renstra DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS I			
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja ▪ Persentase Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> - Capaian Realisasi Fisik - Capaian Realisasi Keuangan 	<div>B</div> <div>100%</div> <div>95%</div>	<div>B</div> <div>100%</div> <div>96,02%</div>	<div>100</div> <div>100</div> <div>101,07</div>
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis I			100,36
SASARAN STRATEGIS II			
Meningkatnya Realisasi Investasi			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nilai Realisasi Investasi: <ul style="list-style-type: none"> PMA (ribu USD) PMDN (juta rupiah) ▪ Persentase Izin Penanaman Modal yang Direalisasikan 	<div>43.729,75</div> <div>3.280.628,09</div> <div>22 %</div>	<div>197.425,20</div> <div>1.516.964,30</div> <div>43,15%</div>	<div>404,19</div> <div>44,89</div> <div>196,14</div>
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis II			215,07
SASARAN STRATEGIS III			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Satu Pintu			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu ▪ IKM (Indek Kepuasan Masyarakat) 	<div>80 %</div> <div>3,3</div>	<div>80,04 %</div> <div>3,23</div>	<div>100,05</div> <div>97,88</div>

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis III	98,97
Rata-rata capaian kinerja keseluruhan	138,19

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat di tingkat korporat tahun 2017 adalah sebesar 138,19%, yang diperoleh dari rata-rata capaian kinerja keseluruhan. Capaian kinerja pada sasaran strategis I sebesar 100,36%, capaian sasaran strategis II sebesar 215,07%, dan capaian strategis III sebesar 98,97%. Ketiga sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 6(enam) indikator kinerja. Dari keseluruhan indikator yang ditetapkan pada ketiga sasaran tersebut, hampir semua indikator mencapai target kecuali indikator Kinerja Nilai Realisasi Investasi PMDN dan indikator Kinerja IKM yang masih di bawah target yang ditetapkan, yaitu untuk Nilai Realisasi PMDN dari target sebesar Rp. 3.379.046,35 juta terealisasi sebesar Rp. 1.516.964,30 juta atau sebesar 44,89% dan Kinerja IKM dari target sebesar 3,3 terealisasi sebesar 3,23 atau sebesar 98,97%.

Sasaran Strategis **Meningkatnya Tata Kelola Organisasi** dengan dua indikator, yaitu Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Capaian Realisasi Keuangan Pelaksanaan Program dan Kegiatan dapat melampaui target kinerja yang ditetapkan. Target Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dapat dicapai dengan nilai "B" dan Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program dan Kegiatan dari target realisasi fisik sebesar 100% terealisasi 100% atau sebesar 100% dan target keuangan sebesar 95% terealisasi sebesar 96,02% atau 101,07%.

Sasaran strategis **meningkatnya Realisasi investasi di Sumatera Barat**, dicapai melalui penambahan realisasi PMA maupun PMDN, pada tahun 2017 dapat dicapai bahkan melebihi target. Realisasi investasi pada tahun 2017 sebesar Rp. 4.121.964.300.000,- dari yang ditargetkan sebesar Rp. 4.023.622.932.000,- dengan capaian persentase kinerja sebesar 102,47% atau Rp. 99.638.748.000,- yang terdiri dari PMA sebesar Rp. 2.605.297.680.000,- dan PMDN sebesar Rp. 1.516.964.300.000,-. Realisasi PMA didominasi pada sektor Pertambangan dengan realisasi investasi sebesar US\$ 167.625,- ribu atau sebesar 86,22% kemudian disusul oleh sektor Listrik, Gas dan Air dengan realisasi investasi sebesar US\$ 10.057,60 ribu atau sebesar 5,17%, sektor Hotel dan Restoran dengan realisasi investasi sebesar US\$ 3.989,60 ribu atau sebesar 2,05%, sektor Tanaman Pangan dan Perkebunan dengan realisasi investasi sebesar US\$ 3.842,9 ribu atau sebesar 1,98% dan sektor Industri Makanan dengan realisasi investasi sebesar US\$ 4.313,20 ribu atau sebesar 2,22%. Realisasi Investasi PMDN berdasarkan sektor usaha didominasi oleh sektor Industri Logam, Mesin dan Elektronika dengan realisasi investasi sebesar Rp. 648.675,10 juta atau sebesar 42,76%, kemudian disusul oleh sektor Industri Makanan dengan realisasi investasi sebesar Rp. 234.019,40 juta atau sebesar 15,43% atau sebesar 9,97%, sektor Pertambangan

dengan realisasi investasi sebesar Rp. 96.107,90 juta atau sebesar 6,34% dan sektor Peternakan dengan realisasi investasi sebesar Rp. 95.071,90 juta atau sebesar 6,27%.

Berdasarkan lokasi realisasi PMA tahun 2017, investasi PMA terbesar terletak di Kab. Solok Selatan dengan realisasi investasi sebesar US\$ 167.093,20 ribu pada sektor Pembangkitan Tenaga Listrik, kemudian disusul Kab. Tanah Datar dengan realisasi investasi sebesar US\$ 9.364,90 ribu pada sektor Pembangkitan Tenaga Listrik, Kota Padang dengan realisasi investasi sebesar US\$ 4.442,20 ribu pada sektor Industri Karet, Perdagangan Besar, Wisata Tirta, Kab. Kep. Mentawai dengan realisasi investasi sebesar US\$ 3.869,80 pada sektor Penyediaan Jasa Akomodasi dan Kab. Dharmasraya dengan realisasi investasi sebesar US\$ 3.528,20

Ribu pada sektor Perkebunan Kelapa Sawit dan realisasi PMDN tahun 2017 berdasarkan lokasi, pertama di Kota Padang dengan realisasi investasi sebesar Rp. 713.291,80 juta kemudian disusul oleh Kab. Padang Pariaman dengan realisasi investasi sebesar Rp. 174.733,40 juta, Kab. Agam dengan realisasi investasi sebesar Rp. 173.892,30 juta, Kab. Pasaman Barat dengan realisasi investasi sebesar Rp. 170.773,90 juta dan Kab. Sijunjung dengan realisasi investasi sebesar Rp. 88.033,40 juta.

Berdasarkan asal negara (5 besar) adalah didominasi oleh Negara Jepang dengan realisasi investasi PMA sebesar US\$ 166.933,70 ribu atau 85,86%, kemudian disusul oleh Negara Singapura dengan realisasi investasi PMA sebesar US\$ 13.631,60 ribu atau 7,01%, Negara Seychelles dengan realisasi investasi PMA sebesar US\$ 3.131,40 ribu atau 1,61%, Negara Malaysia dengan realisasi investasi PMA sebesar 2.747,10 ribu atau 1,41% dan Negara Brazil dengan realisasi investasi PMA sebesar US\$ 1.134,40 ribu atau 0,58%.

Pencapaian indikator kinerja kedua pada sasaran strategis kedua yakni Persentase Izin Penanaman Modal yang Direalisasikan untuk tahun 2017 dari target 22% atas persentase izin penanaman modal yang direalisasikan dapat terealisasi sebesar 43,15% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 215,75%. Jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun 2016, dari jumlah izin prinsip PMA dan izin prinsip PMDN yang merealisasikan kegiatannya dibandingkan dengan izin prinsip PMA dan izin prinsip PMDN yang masih berlaku capaian kinerja sebesar 27,44%, capaian kinerja pada tahun 2017 sangat jauh peningkatannya yaitu sebesar 43,15% dengan kata lain ada kenaikan sebesar 157,25%.

Sasaran strategis **Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu** dicapai melalui persentase perizinan penanaman modal yang diterbitkan tepat waktu belum dapat dipenuhi, tingkat capaian kinerjanya sebesar 100 %. Jumlah perizinan/non perizinan bidang penanaman modal yang diterbitkan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebanyak 2.119 izin/non izin prinsip penanaman modal PMDN. Perizinan PMA merupakan kewenangan pemerintah pusat diatur oleh ketentuan perundang-undangan, sementara kewenangan Pemerintah Provinsi adalah perizinan PMDN lintas Kabupaten/Kota. Dari 13 (tiga

belas) izin prinsip penanaman modal yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat 11 (sebelas) izin prinsip Penanaman Modal tidak dapat diselesaikan sesuai dengan SOP disebabkan karena; 1. Belum adanya penegasan kewenangan perizinan Penanaman Modal antara Pusat dengan Pemerintah Provinsi; 2. Pemahaman pelaku usaha tentang pengisian form pendaftaran; 3. Waktu pengembalian form pendaftaran yang lambat dikembalikan oleh pelaku usaha ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

Pada tahun 2017 ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, telah melakukan *Surveillance Sertifikasi*

Manajemen Mutu ISO SNI 9001:2008 oleh Lembaga Sertifikasi *PT. ASRicert Internasional Indonesia* yang hasilnya diterima pada tanggal 29 September 2017 dan akan ditingkat menjadi ISO 9001:2015 di tahun 2018. Diharapkan nantinya kinerja terhadap pelayanan guna mencapai pelayanan prima yaitu pelayanan cepat, tepat, murah, aman, berkeadilan dan akuntabel dapat terlaksana dengan baik, sehingga dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya dan dapat meningkatkan realisasi investasi di Sumatera Barat.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Penanaman Modal adalah merupakan salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh daerah sebagai pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Sebagai salah satu urusan wajib yang memberikan pelayanan kepada masyarakat (*public services*), Pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai salah satu bentuk kepastian hukum kepada para penanam modal baik dalam negeri maupun asing yang akan berinvestasi di Indonesia. Kebijakan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk lebih mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan daerahnya secara maksimal dan efisien, sehingga mampu memberdayakan potensi yang ada pada masing-masing daerah guna mencapai kemandirian perekonomian yang akhirnya dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat. Terakhir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitas Kerjasama Dunia Usaha.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi antara lain:

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitas Kerjasama Dunia Usaha;
2. Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitas Kerjasama Dunia Usaha;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Daerah di Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitas Kerjasama Dunia Usaha;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitas Kerjasama Dunia Usaha; dan
5. Pelaksanaan Fungsi Kedinasan Lain Yang diberikan Oleh Pimpinan.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2017

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK (PP 6/2008)	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2015 (thn n-2)	TAHUN 2016 (thn n-1)	TAHUN 2017 (thn n)	TAHUN 2018 (thn n+1)	TAHUN 2015 (thn n-2)	TAHUN 2016 (thn n-1)	TAHUN 2017 (thn n)	TAHUN 2018 (thn n+1)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Jumlah Persetujuan		✓					56	96	158		
2.	Kenaikan / (penurunan) Nilai Realisasi PMA (dalam ribu dollar)		✓					34,45%	99,39%	145,28%	-	
	Kenaikan / (penurunan) Nilai Realisasi PMDN (dalam juta rupiah)		✓					158,32%	19,17%	(60,03%)	-	
3.	Rasio daya serap tenaga kerja		✓					39,57%			-	
4.	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	1 sektor						1	2	2	2	
5.	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah provinsi dalam rangka kerjasama kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM) tingkat provinsi dengan pengusaha nasional/asing	1 kali						1	1	1	1	
6.	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal provinsi	1 kali						10	8	8	10	

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK (PP 6/2008)	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2015 (thn n-2)	TAHUN 2016 (thn n-1)	TAHUN 2017 (thn n)	TAHUN 2018 (thn n+1)	TAHUN 2015 (thn n-2)	TAHUN 2016 (thn n-1)	TAHUN 2017 (thn n)	TAHUN 2018 (thn n+1)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal: Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Izin Prinsip PMDN, Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja ASing (RPTKA), Perpanjangan izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di lebih dari 1 kabupaten/kota, sesuai kewenangan pemerintah provinsi	100%	-	80%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	-	-
8.	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 kali	-	-	-	-	-	1 kali	1 kali	1 kali	-	-
9.	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE)	100%	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-
10.	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 kali	-	-	-	-	-	2	2	6	-	-

Pencapaian indikator kinerja kunci yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 terkait penanaman modal, pada tahun 2017 jumlah persetujuan yang terdiri dari izin prinsip baik pendaftaran, perluasan dan perubahan sebanyak 96 izin dengan rencana investasi PMA sebesar US\$ 6,8 miliar dan rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 1.125 orang, sementara rencana investasi PMDN sebesar Rp 5,91 triliun dan rencana penyerapan tenaga kerja sebanyak 10.304 orang. Jumlah izin pada tahun 2015 tersebut mengalami penambahan sebanyak 40 izin atau meningkat sebesar 71,43%, dibandingkan dengan tahun 2014 sebanyak 56 izin. Pencapaian ini juga didukung oleh tekad dan perhatian dari pemerintah dan pemerintah daerah di Sumatera Barat yang memberi kemudahan terhadap calon investor terutama dalam pengurusan izin penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. SPM ditetapkan oleh Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. SPM di bidang Penanaman Modal disusun oleh Pemerintah dalam hal ini Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pusat melalui Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pada tahun 2016, 7 (tujuh) target indikator pelayanan dasar yang dapat tercapai dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pelayanan Dasar *Kebijakan Penanaman Modal* dengan indikator *tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan* dapat tercapai sebanyak 1 (satu) sektor/bidang usaha yaitu: Feasibility Study Proyek Investasi Sektor industri perkapalan skala kecil sesuai dengan target nasional.
2. Pelayanan dasar *Kerjasama Penanaman Modal* Oleh PDPPM fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat Provinsi dengan pengusaha tingkat Nasional/asing dengan indikator *Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah provinsi dalam rangka kerjasama kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) tingkat provinsi dengan pengusaha nasional/asing* dapat tercapai sebanyak 1 (satu) kali sesuai target nasional.
3. Pelayanan dasar *Promosi Penanaman Modal Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal (PDPPM)* dengan indikator *terselenggaranya promosi peluang penanaman modal tingkat provinsi* sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan rincian, mengikuti event/pameran promosi sebanyak 10 (sepuluh) kali dalam negeri dan gelar potensi daerah sebanyak 1 (satu) kali, melewati capaian target nasional.

4. Pelayanan dasar Pelayanan Penanaman Modal dengan indikator terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PDPPM di tingkat provinsi dengan tingkat capaian sebesar 76,29%.

Dalam rangka penyelenggaraan PTSP telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 87 Tahun 2012 tentang pendelegasian wewenang pemberian perizinan dari Gubernur kepada Kepala BKPMP Sumatera Barat selaku Penyelenggara PTSP meliputi sebanyak 97 jenis perizinan yang terdiri dari 15 sektor. Dan berdasarkan Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor: 120.4/57-PERIZ/DPM & PTSP/V/2017 Tanggal 5 Mei 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Sumatera Barat terdapat kenaikan jumlah perizinan yang dikelola menjadi 247 perizinan dan Non Perizinan dari 19 Sektor. Kinerja PTSP pada tahun 2016 secara keseluruhan dapat dinilai sangat baik, dimana jumlah izin yang diterbitkan oleh PTSP Sumatera Barat sebanyak 1.098 izin dan 8 rekomendasi. Dari 15 sektor yang dilayani, hanya 2 sektor yang tidak ada penerbitan izin ataupun rekomendasi yaitu sektor peternakan, dan pariwisata. Rincian perizinan/nonperizinan yang diterbitkan PTSP sebagaimana Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3
Rekapitulasi Perizinan/Non Perizinan yang Diterbitkan PTSP
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

NO	SEKTOR	IZIN	NON IZIN (REKOMENDASI)
1	Penanaman Modal	13	
2	Perindustrian Dan Perdagangan	10	11
3	Energi Dan Sumber Daya Mineral	385	-
4	Peternakan	1	64
5	Kesehatan	37	14
6	Pendidikan	16	-
7	Kehutanan	58	1
8	Kelautan Dan Perikanan	435	-
9	Perkebunan	42	-
10	Ketenagakerjaan	199	-
11	Pengelolaan Sumber Daya Air	10	-
12	Prasarana Jalan Tata Ruang	4	-
13	Pariwisata	-	-
14	Perhubungan	171	88
15	Lingkungan Hidup	15	1
16	Sosial	15	-
17	Perumahan Rakyat, Pertanahan	-	-
18	Koperasi dan UKM	-	-
19	Kesbangpol	-	529
	JUMLAH	1.411	708
	TOTAL	2.119	

5. Pelayanan dasar Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan indikator terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dan dunia usaha. Sudah dilaksanakan pertemuan berupa Bimbingan Teknis Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Aparatur Prop/Kab/Kota dengan sumber dana dari APBD dan Bimbingan kepada dunia usaha berupa Konsinyering Pelaksanaan Penanaman Modal dengan Sumber dana APBN (Dekonsentrasi).
6. Pelayanan dasar Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan indikator terimplementasinya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) dapat tercapai 100%, dengan jumlah jenis pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE sebanyak 4 (empat) jenis pelayanan.

7. Pelayanan dasar Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal dengan indikator *terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha* dapat tercapai melebihi target nasional yaitu sebanyak 1 (satu) kali, sesuai dengan capaian nasional.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam upaya meningkatkan investasi di Sumatera Barat, DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat selalu berupaya untuk berkoordinasi dengan instansi terkait pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta dunia usaha. Baik dalam upaya penyelesaian permasalahan/kendala didalam pelaksanaan penanaman modal maupun dalam mensinergikan program kegiatan secara formal melalui forum dan pertemuan koordinasi perencanaan. Pada tahun 2016 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat telah mengadakan Pertemuan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan instansi terkait provinsi dan kabupaten/kota serta telah mengikuti Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal (KP3MN) ditingkat regional dan nasional. Pada masing-masing pertemuan tersebut telah dibahas permasalahan dan tindak lanjut terhadap perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal dengan instansi terkait provinsi dan kabupaten/kota serta di wilayah Sumatera dan Nasional. Pada pertemuan tersebut juga telah disinergikan program/kegiatan antara kabupaten/kota, regional dan nasional.

Pada tahun 2017, permasalahan dan hambatan yang masih dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Pelayanan terhadap penanam modal (investor) masih belum optimal, karena masih kurangnya kuantitas dan kualitas aparatur terutama yang bersifat teknis agar dapat bekerja secara profesional dan masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan penanaman modal.
2. Data dan Informasi Potensi daerah yang dipromosikan kepada calon investor belum akurat.
3. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan PMA/PMDN serta masih banyaknya perusahaan PMA/PMDN yang belum menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
4. Dokumen perencanaan pendukung investasi di daerah yang dibutuhkan oleh calon investor belum memadai.
5. Perusahaan PMA/PMDN masih kurang terbuka terhadap permasalahan yang dihadapinya dan tidak melaporkannya ke DPM & PTSP Sumbar selaku Tim Task Force Investasi di tingkat Provinsi.
6. Keuangan negara dan keuangan daerah belum mampu mencukupi kebutuhan pembangunan infrastruktur publik, fasilitas kesehatan, sanitasi dan

pendidikan yang memadai serta untuk pembiayaan upaya-upaya peningkatan penanaman modal.

7. Masih belum terwujudnya jaminan stabilitas politik, keamanan dan penegakan hukum yang konsisten, lemahnya penegakan hukum yang terkait dengan kinerja pengadilan niaga, disamping itu efisiensi peradilan dalam penyelesaian sengketa masih rendah dan biaya untuk mendapatkan kepastian hukum dari peradilan di Indonesia relatif tinggi, dibandingkan negara-negara di Asia, peradilan di Indonesia termasuk lama dalam penyelesaian sengketa usaha.

Dari permasalahan tersebut diatas dapat direkomendasikan solusinya sebagai berikut:

1. Peningkatan jumlah dan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugasnya terutama yang bersifat teknis dengan memberikan pelatihan teknis terkait sesuai dengan bidang tugasnya dan melengkapi sarana prasarana pendukung pelayanan investasi.
2. Tetap melakukan penelitian dan pengkajian yang lebih akurat serta meningkatkan kualitas bahan materi promosi terhadap potensi dan peluang investasi dengan melibatkan tenaga ahli dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota.
3. Meningkatkan pengendalian (pemantauan, pembinaan dan pengawasan) pelaksanaan penanaman modal terhadap PMA/PMDN yang terkendala didalam penyampaian LKPM dengan diupayakan langsung ke lokasi proyek.
4. Memberi dukungan terhadap permasalahan investasi dengan melakukan pendekatan persuasif dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan investasi, serta meningkatkan ketertiban dan meningkatkan kinerja tim task force penanaman modal.
5. Perlunya peningkatan sarana prasarana penunjang untuk menarik minat investor seperti Jalan, Bandara, Pelabuhan, Air bersih, kelistrikan dan fasilitas umum lainnya).

Indonesia tetap memiliki peluang besar untuk memanfaatkan penanaman modal sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena Indonesia dianggap sebagai salah satu negara yang memiliki daya tarik penanaman modal. Disisi lain, Indonesia menyediakan beragam sektor penanaman modal, begitu juga dengan Sumatera Barat. Adapun pokok perhatian pada peluang dibidang penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan sumber daya alam yang belum optimal, memungkinkan untuk pengembangan penanaman modal di Sumatera Barat;
2. Meningkatnya kebutuhan dunia akan perikanan, kelautan, pariwisata, agro industri, energi dan pertambangan yang merupakan potensi Sumatera Barat yang dapat dijadikan peluang investasi yang dapat ditawarkan kepada investor;
3. Indonesia semakin memiliki daya tarik yang besar bagi investasi asing. Laporan Global Competitiveness Report 2016-2017 yang diterbitkan World

Economic Forum (WEF) menempatkan Indonesia pada peringkat 41 dari 138 negara yang disurvei. Peringkat Indonesia ini berada di atas negara-negara seperti Rusia di peringkat 43, Italia di peringkat 44, Portugal di peringkat 46, Afrika Selatan di peringkat 47, Bulgaria di peringkat 50 dan Brazil yang berada di peringkat 81.

Di level ASEAN sendiri, peringkat Indonesia ini masih berada di bawah tiga negara tetangga, yaitu Singapura yang berada di peringkat 2, Malaysia di peringkat 25 dan Thailand yang berada di peringkat 34. Namun demikian, Indonesia masih mengungguli Filipina yang berada di peringkat 57, Vietnam di peringkat 60, Brunei Darussalam di peringkat 48, Laos di peringkat 93. Dari laporan-laporan World Economic Forum terdahulu tercatat, indeks daya saing global Indonesia sempat berada di peringkat 54 pada tahun 2009, lalu naik ke peringkat 44 pada tahun 2010. Peringkat Indonesia kembali turun ke peringkat 46 pada tahun 2011 dan peringkat 50 pada tahun 2012, untuk selanjutnya kembali naik ke peringkat 38 pada tahun 2013. Indeks daya saing Indonesia berdasarkan Global Competitiveness Report 2016-2017 yang diterbitkan World Economic Forum (WEF) turun 4 level dari peringkat 37 pada tahun 2015-2016.

Sebagai informasi, dengan menggabungkan data kuantitatif dan survei, penilaian peringkat daya saing global ini didasarkan pada 113 indikator yang dikelompokkan dalam 12 pilar daya saing. Kedua belas pilar tersebut yaitu institusi, infrastruktur, kondisi dan situasi ekonomi makro, kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan tingkat atas dan pelatihan, efisiensi pasar, efisiensi tenaga kerja, pengembangan pasar finansial, kesiapan teknologi, ukuran pasar, lingkungan bisnis, dan inovasi

Ketidakpastian gejolak eksternal yang masih tinggi menjadi tantangan/ancaman utama kegiatan penanaman modal, khususnya PMA. Beberapa hal yang menjadi tantangan penanaman modal dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Peringkat kemudahan berbisnis Indonesia masih belum beranjak dari posisi bawah di antara negara-negara di dunia. Pada tahun 2015 dalam survei Ease of Doing Business (kemudahan berbisnis), yang dirilis oleh World Bank Group naik 18 peringkat ke peringkat 91 dari 190 negara. Sebelumnya pada tahun 2015 Indonesia berada di posisi 109. Indonesia tertinggal jauh di belakang Singapura, yang menempati posisi kedua dan negara Asean lainnya seperti Malaysia di posisi 23, Thailand di posisi 46, Brunei Darussalam di posisi 50 dalam daftar tersebut. Posisi Indonesia ini berbanding terbalik dengan peringkat yang memiliki daya tarik bagi investor. Untuk itu masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar ke depan Indonesia bisa lebih ramah bagi investor.

Survei dilakukan oleh World Bank Group dengan menggunakan data dalam kurun waktu antara 2 Juni 2014 sampai 1 Juni 2015. Ada 10 indikator kemudahan berusaha yang diukur oleh World Bank Group, diantaranya adalah kemudahan memulai usaha, perizinan mendirikan bangunan, penyambungan listrik, pembayaran pajak, pendaftaran properti, perdagangan lintas negara. Dari survei yang dilakukan tercatat, Indonesia mengalami perbaikan dalam 5 indikator, yakni perizinan mendirikan bangunan, penyambungan listrik, pembayaran pajak, akses per kreditan, dan penegakan kontrak. Sedangkan 5 indikator yang mengalami penurunan peringkat adalah kemudahan memulai usaha, pendaftaran properti, perdagangan lintas negara, perlindungan terhadap investor, serta penyelesaian perkara kepailitan.

Penurunan paling signifikan adalah indikator memulai usaha yang turun dari peringkat 155 ke 173. Meski demikian, World Bank mencatat ada hal positif, waktu total untuk memulai usaha bisa dipangkas dari 52,5 hari menjadi 47,8 hari. Adapun indikator pembayaran pajak mengalami perbaikan yang positif. Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan secara elektronik dari 12 kali menjadi 1 kali pembayaran, jenis pembayaran berkurang dari 65 menjadi 54 jenis per tahun. Selain itu besaran pajak berkurang dari 31,4 persen menjadi 29,7 persen dari laba. Indonesia termasuk dalam 24 negara yang paling banyak melakukan perbaikan kemudahan berbisnis pada tahun ini. "Indonesia tahun ini termasuk 24 top performance countries yang mengimplementasikan perbaikan kemudahan berusaha, paling tidak untuk 10 indikator dari World Bank," tutupnya.

2. Dampak krisis keuangan global telah menyebabkan perubahan regulasi di berbagai negara dan kebijakan proteksi yang kian intensif. Upaya pemulihan dari krisis yang dilakukan negara-negara dengan dampak krisis terbesar seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, tidak serta merta dapat menggenjot pertumbuhan perekonomian dunia. Lembaga keuangan dunia masih akan dihadapkan pada kesulitan likuiditas yang parah meski upaya intervensi pemerintah otoritas setempat telah dilakukan, dengan demikian para pemodal asing akan menghadapi kesulitan sumber-sumber pendanaan;
3. Negara-negara tetangga Asean memberikan insentif yang lebih menarik sehingga dapat meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya. Dibandingkan dengan negara-negara tetangga, insentif perpajakan di Indonesia relatif tertinggal;
4. Provinsi lain lebih siap dalam memfasilitasi investor, baik dilihat dari sisi kebijakan dan aturan serta infrastruktur pendukung penanaman modal.

Isu strategis yang mempengaruhi pengembangan penanaman modal di Sumatera Barat adalah:

1. Kepastian hukum dan koordinasi antar instansi penanaman modal provinsi dan kabupaten/kota masih lemah
2. Meningkatkan daya tarik dan daya saing investasi daerah

Kedua isu tersebut di atas perlu segera dicarikan jalan keluarnya kalau kita ingin Sumatera Barat dapat menarik investasi yang lebih banyak. Menarik investor untuk berinvestasi di Sumatera Barat diperlukan kerja keras dan keterlibatan semua pihak yang terkait. Selain itu diperlukan perbaikan-perbaikan iklim investasi yang kondusif, sehingga sasaran peningkatan investasi dapat terwujud.

Percepatan pertumbuhan ekonomi memerlukan investasi yang semakin besar, segala upaya yang mendorong peningkatan investasi mesti menjadi prioritas. Investasi swasta sangat tergantung kepada insentif yang tersedia dan disediakan oleh pemerintah. Investasi akan mengalir ke lokasi yang aliran manfaatnya lebih besar sehingga menarik investor. Dalam mempercepat tingkat pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat disamping kegiatan ekonomi dengan skala kecil dan menengah diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, investasi juga diharapkan tumbuh lebih cepat, agar dapat menggerakkan sektor riil, sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) didasarkan pada penjaringan aspirasi yang secara formal diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu RKPD tahun 2019 mengintegrasikan program-program pemerintah pusat, program-program kabupaten/kota maupun program-program hasil penjaringan aspirasi yang telah diformulasikan melalui Musrenbang RKPD Tahun 2018.

Pada lampiran II tabel Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2019 berdasarkan analisis kebutuhan, terdapat 2 (dua) program baru yaitu : Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi dan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu. Beberapa kegiatan yang muncul setelah dianalisis, antara lain:

- Pengadaan Mebeuler
- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyelesaian Permasalahan Investasi
- Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal

- Updating Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal
- Forum Investasi Sumatera Barat
- Promosi Investasi
- Gelar Potensi dan Temu Usaha
- Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Sumatera Barat
- Publikasi dan Sosialisasi Informasi Penanaman Modal
- Koordinasi Promosi dan Misi Investasi
- Koordinasi Strategi Promosi Peluang Investasi
- Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal
- Bimbingan Teknis Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- Forum Komunikasi Usaha Daerah
- Penyusunan Buku Direktori Mitra Usaha
- Workshop Pola Pikir dan Budaya Kerja
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Yang Berbasis IT
- Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan
- Penilaian Standar Mutu Perizinan
- Peningkatan Penyelesaian Masalah Pelayanan Perizinan
- Sikronisasi dan Harmonisasi tentang Cara Pelayanan Perizinan
- Forum PTSP
- Pembinaan PTSP Kab/Kota se Sumatera Barat
- Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan
- Penyusunan Produk Hukum terkait Perizinan dan Non Perizinan

Semua kegiatan diatas ada yang sudah diakomodir pada renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada tahun 2018 DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat tidak melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat melalui pertemuan, namun ada beberapa kegiatan yang diusulkan oleh instansi terkait kabupaten/kota melalui pertemuan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Sumatera Barat pada tahun sebelumnya. Adapun usulan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

- Inventarisasi Tanah Ulayat yang Berpotensi Untuk Penanaman Modal;
- Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal;
- Pelatihan terkait PTSP;
- Inventarisasi aset daerah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan investasi;
- Penyusunan Study Kelayakan Proyek Investasi.

Semua kegiatan di atas ada yang sudah diakomodir pada renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Renja BKPM & PPT Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 ini didasarkan pada Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Kabinet Kerja telah menetapkan 9 agenda prioritas (9 agenda prioritas). Prioritas keenam dari Nawacita tersebut adalah **meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional**, dengan sub agenda *Menguatkan Peran Investasi*. Adapun sasaran dari sub agenda tersebut adalah:

- Menciptakan layanan satu atap untuk investasi
- Efisiensi Perizinan bisnis menjadi maksimal 15 hari.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Penetapan tujuan dari organisasi DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kepada pernyataan misi yang telah dirumuskan. Tujuan akan menggambarkan sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan dalam periode perencanaan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan, berdasarkan kepada isu-isu yang dapat mendorong pengembangan investasi, maka tujuan rencana kerja penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi, pelayanan, pembinaan dan pengendalian penanaman modal serta perumusan kebijakan yang mendukung investasi.
2. Meningkatkan pelaksanaan promosi dan kerjasama investasi yang efektif.
3. Meningkatkan analisa potensi sumberdaya dan penyediaan data dan informasi penanaman modal yang akurat.
4. Meningkatkan Kualitas pelayanan perizinan terpadu

Sasaran yang ingin dicapai oleh DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat;
2. Meningkatnya Minat dan Keinginan Investor untuk Menanamkan Modalnya di Sumatera Barat;
3. Meningkatnya Kenyamanan Berusaha bagi Investor; dan
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Satu Pintu.

Dalam pencapaian sasaran di atas diperlukan koordinasi dengan semua pihak baik dengan pemerintah, instansi terkait Provinsi, kabupaten/kota dan dunia usaha.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program juga merupakan kumpulan kegiatan yang telah disusun secara sistematis dalam satu kelompok baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran. Ada 2 (dua) Program Prioritas DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat.

a. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Iklim Investasi penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat masih belum kondusif. Hal ini terbukti dengan masih terdapatnya permasalahan yang dihadapi oleh investor didalam kegiatan pelaksanaan penanaman modal di Sumatera Barat, sehingga mengakibatkan masih rendahnya realisasi investasi Sumatera Barat dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Perlu dilakukan upaya-upaya dalam peningkatan realisasi investasi. Peningkatan investasi akan terlihat apabila didukung dengan faktor-faktor yang mempengaruhi investasi baik faktor di luar maupun didalam negeri terutama faktor keamanan, politik dan kepastian hukum. Menyikapi keadaan geografis Sumatera Barat yang rawan gempa, perlu kerja keras dan upaya untuk meyakinkan investor melalui event/pameran maupun pertemuan-pertemuan dengan calon investor bahwa Provinsi Sumatera Barat memiliki 19 Kab/Kota, masih banyak daerah yang dapat dijadikan sebagai tujuan investasi. Sumatera Barat mempunyai peluang untuk menarik investasi karena memiliki beberapa potensi sumberdaya alam yang belum optimal pemanfaatannya dan masih dapat dikembangkan dalam bentuk usaha yang prospektif dan diminati oleh pasar baik dalam maupun luar negeri. Peluang investasi di Sumatera Barat yang kaya sumber daya alam ini masih sangat terbuka. Untuk mengupayakan peningkatan penanaman modal di

Sumatera Barat, perlu adanya kesiapan potensi sumberdaya daerah, baik potensi investasi maupun sarana prasarana pendukung investasi terutama infrastruktur. Adapun kegiatan yang akan dilakukan dalam mendukung program ini adalah sebagai berikut:

- Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal
- Koordinasi Promosi dan Misi Investasi
- Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Gelar Potensi dan Temu Usaha
- Promosi Investasi
- Koordinasi Strategi Promosi Peluang Investasi
- Forum Investasi Sumatera Barat
- Penyusunan Feasibility Study Proyek Investasi
- Penyelesaian Permasalahan Investasi
- Penyusunan Profil Peluang Investasi
- Publikasi dan Sosialisasi Informasi Penanaman Modal
- Updating Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal
- Forum Komunikasi Usaha Daerah

b. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu

Pemberian kemudahan kepada investor akan mampu meningkatkan daya saing penanaman modal di Sumatera Barat terutama melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang pasti akan banyak membantu kemudahan pelayanan perizinan dan informasi di bidang penanaman modal. Kegiatan yang mendukung program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu adalah:

- Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Yang Berbasis Teknologi Informasi
- Peningkatan Penyelesaian Masalah Pelayanan Perizinan
- Sinkronisasi dan Harmonisasi tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Penanaman Modal
- Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan
- Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- Penilaian Standar Mutu Perizinan

Secara lengkap rencana program dan kegiatan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 sebagaimana lampiran III.

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Sumatera Barat Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat untuk periode 1 (satu) tahun, yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat, dengan adanya usulan rencana program dan kegiatan didalam rencana kerja ini, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan antara aparat di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pengusaha dan pihak terkait lainnya dalam meningkatkan peran penanaman modal bagi pembangunan daerah.

Komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* didalam sangat dibutuhkan untuk meningkatkan investasi. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

- a. Peningkatan kompetensi aparatur dalam melaksanakan tugasnya terutama yang bersifat teknis dengan memberikan pelatihan teknis sesuai dengan bidang tugasnya dan tanggungjawabnya serta melengkapi sarana prasarana pendukung pelayanan investasi;
- b. Tetap melakukan penelitian dan pengkajian yang lebih akurat terhadap potensi dan peluang investasi dengan melibatkan tenaga ahli dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota;
- c. Meningkatkan pengendalian (pemantauan, pembinaan dan pengawasan) pelaksanaan penanaman modal terhadap PMA/PMDN yang terkendala didalam penyampaian LKPM dengan diupayakan langsung ke lokasi proyek;
- d. Meningkatkan pelaksanaan promosi atau keikutsertaan dalam event/pameran dan mengadakan pertemuan dibidang investasi dengan sasaran calon investor dalam dan luar negeri dalam upaya menarik minat calon investor menanamkan modalnya di Sumatera Barat serta melakukan misi investasi ke negara-negara yang berpotensi dan berminat terhadap peluang investasi di Sumatera Barat, disamping itu juga perlu meningkatkan kualitas bahan materi promosi;
- e. Memberi dukungan terhadap permasalahan investasi dengan melakukan pendekatan persuasif dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan investasi, serta meningkatkan ketertiban dan meningkatkan kinerja tim task force penanaman modal.

Akhirnya, dengan tersusunnya Rencana Kerja (renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018, diharapkan nantinya dapat meningkatkan realisasi investasi dan menggerakkan perekonomian di Sumatera Barat.